



# LENTERA

## Korupsi dan Akreditasi

Oleh Rendra Widyatama



SM/dok

**MENGIKUTI** berita-berita korupsi terutama yang ditangani KPK, memperlihatkan pada kita sejumlah fakta bahwa sebagian pelaku ternyata lulusan perguruan tinggi. Tentu fakta itu memunculkan gugatan atas keseriusan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang antikorupsi.

Bila direnungkan, sebenarnya ada sepercik harapan yang mungkin bisa dilakukan untuk memagari perguruan tinggi dari korupsi. Harapan tersebut datang dari pengaturan instrumen akreditasi. Pengelola kampus terlebih para asesor BAN, pasti mengetahui bahwa salah satu borang akreditasi memusatkan perhatian pada alumni. Item inilah yang bisa dimanfaatkan bagi rekayasa sistem untuk menjaga kampus dari korupsi. Bila ada alumni yang korupsi, akan menjadi faktor pengurang nilai akreditasi.

Ada dua syarat yang perlu dilakukan agar instrumen akreditasi dapat mendukung tujuan ini. Pertama, perlu penyeragaman instrumen evaluasi penelusuran alumni dalam mengungkap bagaimana respons pengguna pada lulusan dan integritas alumni.

### **Pakta Integritas**

Prasyarat kedua, perlu adanya integrasi *data base* dan sistem komunikasi *online* yang baik minimal antara empat pihak, yaitu kampus, Dikti, Badan Akreditasi Nasional, dan penegak hukum, termasuk KPK. Dengan sistem seperti ini, maka bila penegak hukum mencatat ada lulusan perguruan tinggi yang melakukan korupsi, data tersebut akan otomatis terhubung dengan BAN, Dikti, dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Selama ini jabatan akademik profesor dan kesarjanaan dapat dicabut bila seseorang terbukti melakukan plagiarisme. Mekanisme seperti ini bisa diperluas bagi kasus alumni yang korupsi, misalnya kampus mencopot gelar kesarjanaan alumni, sehingga berbagai hak terkait dengan kesarjanaan tersebut hilang. Tindakan keras seperti ini diharapkan mampu memberi efek kejut yang signifikan bagi semua *civitas academica*, termasuk alumni.

Sistem seperti ini akan membuat perguruan tinggi berupaya mengatur diri makin keras, termasuk membuat aturan untuk memaksa agar alumni menjaga integritas. Kampus bisa saja meniru organisasi ikatan dokter yang dapat mencabut hak dan legalitas praktik bila ada dokter yang melakukan kesalahan.

Akreditasi merupakan status sangat penting bagi institusi kampus. Kredibilitas institusi akan terpermin melalui status akreditasi. (37)

— Rendra Widyatama SIP MSI, ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UAD

## SUARA MERDEKA

PEREKAT KOMUNITAS JAWA TENGAH

18 EDUKASIA

SABTU, 21 SEPTEMBER 2013